



## STRATEGI PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI KECAMATAN PADALARANG KABUPATEN BANDUNG BARAT

**Ilham Aprilliansyah**

Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas  
Jenderal Achmad Yani, Indonesia

### **Abstrak**

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis strategi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi peningkatan IPM di Kecamatan Padalarang, yang meliputi aspek *Enterprise Strategy*, *Corporate Strategy*, *Business Strategy*, dan *Functional Strategy*, belum optimal. Beberapa hambatan utama yang dihadapi antara lain rendahnya pengetahuan masyarakat, tingginya angka buta aksara, tingkat putus sekolah yang tinggi, serta pola konsumsi makanan yang kurang bergizi yang berdampak pada kesehatan masyarakat, seperti tingginya angka stunting dan rendahnya angka harapan hidup. Selain itu, rendahnya daya beli masyarakat juga menjadi masalah utama, dengan kecenderungan masyarakat lebih memilih bekerja sebagai tenaga kerja dibandingkan membangun usaha mandiri, yang berujung pada produktivitas yang rendah. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintahan Kecamatan Padalarang untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain dengan mengadakan program penetasan buta aksara, pemberian beasiswa, peningkatan sarana prasarana pendidikan, kerjasama dengan Dinas Kesehatan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, serta menyediakan fasilitas perizinan usaha untuk masyarakat. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat Kecamatan Padalarang.

**Kata Kunci:** Strategi, Indeks Pembangunan Manusia, Kabupaten Bandung Barat

### **Abstract**

*This article aims to analyze the strategies for improving the Human Development Index (HDI) in Padalarang District, West Bandung Regency. The research method used is descriptive with a qualitative approach. The results indicate that the strategies for improving HDI in Padalarang, covering aspects of Enterprise Strategy, Corporate Strategy, Business Strategy, and Functional Strategy, are not yet optimal. Key challenges include low levels of public knowledge, high illiteracy rates, high school dropout rates, and poor dietary habits that negatively affect public health, such as high stunting rates and low life expectancy. In addition, low purchasing power among the community is also a major issue, with a tendency for people to prefer working as laborers rather than establishing independent businesses, resulting in low*

*productivity. Efforts made by the Padalarang District Government to address these issues include implementing literacy programs, providing scholarships, improving educational infrastructure, collaborating with the Health Office to enhance healthcare services, and facilitating business permits for the community. These initiatives are expected to contribute to improving the welfare and economy of Padalarang District's residents.*

**Keywords:** Strategy, Human Development Index, West Bandung Regency.

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu memperhatikan banyak faktor dalam pembangunan. Ndraha (1990:11) mengemukakan bahwa “pembangunan adalah perubahan sosial artinya sebagai sebuah perubahan sosial maka pembangunan juga menyangkut pembangunan ekonomi, dan menyangkut segenap aspek kehidupan bangsa”. Hal ini menegaskan bahwa pembangunan nasional (*National Building*) juga harus didukung kemampuan ekonomi (sumber-sumber atau *resources*), maupun kondisi sosial.

Nugroho (2001:97) menyatakan bahwa: “Secara teknis ekonomi, parameter untuk mengukur pembangunan manusia ini adalah diperkenalkannya tolok ukur (PQLI) (*Physical Quality of Life Index*, Indeks Kualitas Hidup Fisik) – yang terdiri dari tiga indikator: (1) angka kematian bayi; (2) harapan hidup bayi berumur satu tahun; (3) tingkat kemampuan membaca dan menulis”.

Setiap tahun UNDP meranking Negara-negara di dunia dalam Indeks Pembangunan Manusia. Pada tahun 2022, Indonesia menempati urutan 107 dari 189 negara dengan Indeks 70,94. Sedangkan pada tahun 2021, Indonesia menempati urutan 111 dari 189 negara dengan indeks 71,92. Indeks Pembangunan Manusia Baik di ASEAN maupun di dunia, Indonesia ada di peringkat tengah. Di kawasan Asia Tenggara dalam hal IPM Indonesia masih tertinggal dari Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, dan Filipina.

Untuk dapat meningkatkan IPM haruslah: (1) Produktivitas rakyat ditingkatkan dengan peran serta rakyat sepenuhnya dalam proses pembangunan; (2) Ada pemerataan kesempatan ekonomi dan politik yang

adil sehingga rakyat dapat berperan serta sepenuhnya dalam pembangunan dan mendapatkan keuntungan yang adil dari pembangunan itu; (3) Akses terhadap kesempatan bersifat berkelanjutan, baik untuk generasi sekarang maupun untuk generasi yang akan datang. Semua bentuk modal, baik fisik, sosial, maupun lingkungan hidup haruslah dijamin dapat diperbaharui; (4) Ada pemberdayaan rakyat sehingga pembangunan tidak hanya untuk rakyat, melainkan juga oleh rakyat. Peran serta rakyat meliputi pula dalam pengambilan keputusan yang menentukan nasib rakyat. Berarti, demokrasi merupakan syarat pembangunan manusia, (5) Agar dapat tercapai peningkatan IPM haruslah ada konsistensi antara kebijakan dan pelaksanaannya. Program dan Proyek haruslah konsisten dengan tujuan yang ingin dicapai dengan Kebijakan Pembangunan Manusia.

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan hal yang sangat mendesak dalam pembangunan bidang ekonomi di masa mendatang. Kondisi ini harus menjadi prioritas utama, baik itu dari pihak legislatif (DPRD) maupun eksekutif (pemprov, pemkot, dan pemkab), terutama dalam menyusun APBD (Anggaran Pendapatan dan Balanja Daerah) yang menjadi acuan keuangan pembangunan daerah.

Sejak beberapa tahun terakhir, konsep HDI UNDP diadopsi oleh Biro Pusat Statistik (BPS). BPS menggunakan empat indikator utama untuk menghitung IPM Propinsi dan Kabupaten/ Kota di Indonesia, yaitu angka harapan hidup, melek huruf orang dewasa, lama pendidikan dan pendapatan per kapita. Untuk propinsi Jawa Barat, menurut BPS, pada tahun 2022 Kualitas hidup manusia di Provinsi Jawa Barat masih mengalami kemajuan, ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2022 menjadi 72,09, atau meningkat 0,06 poin dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 72,03 dan berada pada peringkat ke-10 secara nasional dari 34 Propinsi. Dari 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat, Kota Bandung, Kota Bekasi, dan Kota Depok memiliki status IPM "Sangat Tinggi". Salah satu Kabupaten di Jawa Barat yaitu Kabupaten Bandung Barat, IPM tahun 2022 mencapai 69,04 poin, atau tumbuh 0,75 poin dibandingkan tahun 2021 dengan IPM 68,29 poin.

Melihat IPM tersebut, sampai saat ini kondisi IPM Kabupaten Bandung Barat cukup menggembirakan, walaupun usia Kabupaten Bandung Barat masih muda dibandingkan dengan kabupaten atau kota lainnya. Namun demikian berdasarkan studi dokumentasi yang peneliti lakukan IPM Kabupaten Bandung Barat tersebut tidak mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya, dimana Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menargetkan IPM diatas 70,00 poin.

Salah satu Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat yang cukup maju adalah Kecamatan Padalarang yang ditandai dengan pesatnya perkembangan wilayah dan kompleksitas masyarakat rural-urban mendorong pemerintah daerah untuk terus membenahi pembangunan wilayahnya agar terjadi keselarasan antara pusat pertumbuhan dengan daerah belakang (hinterland) sebagai wilayah pelayanannya. Sebagai salah satu Kecamatan yang dikategorikan maju, IPM Kecamatan Padalarang mencapai 73,12 poin, lebih tinggi dibandingkan IPM Kabupaten Bandung Barat.

Berkaitan dengan skripsi ini, peneliti ingin meneliti strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Padalarang dalam peningkatan IPM-nya sehingga bisa melampaui target rata-rata IPM Kabupaten Bandung Barat dan menjadikan Kecamatan Padalarang yang IPM-nya cukup tinggi.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan menjelaskan/menggambarkan data pada masa sekarang (sedang terjadi). Nawawi (2001:63-64) mengemukakan bahwa metode deskriptif dapat diartikan sebagai: “Prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya”. Adapun ciri-ciri pokok metode deskriptif adalah:

- a) Memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan (saat sekarang) atau masalah-masalah yang bersifat aktual.
- b) Menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya.

Adapun pendekatan dari metode deskriptif yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode kualitatif menurut Egon G. Guba dan Yvonna S. Lincoln seperti dikutip Alwasilah (2002:105) bahwa: “metode inilah yang lebih mudah diadaptasikan dengan realitas yang beragam dan saling berinteraksi. Mereka juga dinilai lebih sensitif terhadap segala aspek dan perubahan yang saling mempengaruhi yang bakal dihadapi oleh peneliti”.

Nasution (1996:19) mengemukakan bahwa metode kualitatif ini mempunyai 16 ciri-ciri yakni:

- Penelitian dilakukan dalam *natural setting*
- Peneliti sebagai *human instrument*
- Sangat deskriptif
- Mementingkan proses maupun produk
- Mencari makna
- Mengutamakan data *first hand*
- Melakukan *triangulasi*
- Menonjolkan konteks
- Peneliti berkedudukan sama dengan orang yang diteliti
- Mengutamakan pandangan *emic*
- Mengadakan verifikasi, antara lain melalui kasus negatif
- Melakukan *sampling purposive*
- Melakukan *audit trail*
- Melakukan partisipasi tanpa mengganggu *unobtrusive*
- mengadakan analisis sejak awal
- Disain yang *emergent*.

Ciri dari metode kualitatif menurut pendapat dari Yvonna S. Lincoln dan Egor G. Guba seperti dikutip Alwasilah (2002:105) mengenai rincian paradigma kualitatif sebagai berikut:

- 1) *Natural Settings* (Latar tempat dan waktu penelitian yang alamiah).
- 2) *Humans as primary data gathering instrument* (manusia atau peneliti sendiri sebagai instrument pengumpul data primer).
- 3) *Use of tacit knowledge* (penggunaan pengetahuan yang tidak eksplisit)
- 4) *Qualitative methods* (metode kualitatif)
- 5) *Purposive sampling* (pemilihan sampel penelitian secara purposive)
- 6) *Inductive data analysis* (analisis data secara induktif atau bottom up)
- 7) *Grounded theory* (teori dari dasar yang dilandaskan pada data secara terus menerus)
- 8) *Emergent design* (cetakbiru penelitian yang mencuat dengan sendirinya)
- 9) *Negotiated outcome* (hasil penelitian yang disepakati oleh peneliti dan responden)
- 10) *Case study reporting modes* (cara pelaporan pnelitin gaya studi kasus)
- 11) *Idiographic interpretation* (tafsir idiografik atau kontekstual)
- 12) *Tentative application of findings* (penerapan tentative dari hasil penelitian )
- 13) *Focus determined boundaries* (batas dan cakupan penelitian ditentukan oleh focus penelitian)
- 14) *Special criteria for trustworthiness* (mengikuti criteria khusus untuk menentukan keterpercayaan dan mutu penelitian).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dalam penelitian kualitatif terdapat *Natural settings* (latar tempat dan waktu penelitian yang alamiah), *humans as primary data gathering instruments* (peneliti sendiri sebagai instrumen pengumpul data primer), mempergunakan *Qualitative methods* (metode kualitatif) dan *special criteria for trustworthiness* (mengikuti kriteria khusus untuk menentukan kepercayaan dan mutu penelitian). Menurut Usman dan Akbar (2001:81), metodologi penelitian kualitatif adalah:

Dilakukan dalam situasi yang wajar (*natural setting*) dan data yang dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif.

Metode kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan (*verstehen*). Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaktif tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri.

Responden dalam metode kualitatif berkembang terus (*snowball*) secara bertujuan (*pusposive*) sampai data yang dikumpulkan dianggap memuaskan. Alat pengumpul data atau instrumen penelitian dalam metode kualitatif ialah si peneliti sendiri. Jadi penelitian merupakan *key instrument*, dalam mengumpulkan data si peneliti harus terjun sendiri ke lapangan secara aktif.

Memperhatikan penjelasan tersebut di atas maka peneliti memakai metode kualitatif dengan alasan berdasarkan penelitian pendahuluan yang telah dilakukan, diperoleh gambaran bahwa objek atau *focus of interest* yang menjadi perhatian peneliti menyangkut studi yang membahas strategi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, yang sangat kompleks dan tidak mungkin untuk direduksi ke dalam suatu sudut pandang atau realitas.

## **PEMBAHASAN**

Pembangunan didefinisikan sebagai suatu kegiatan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai aspek kehidupan yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya, informasi dan kemajuan ilmu

pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan perkembangan sosial. Pembangunan manusia merupakan proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). Indeks Pembangunan manusia merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Konsep atau defenisi pembangunan manusia pada dasarnya mencakup dimensi pembangunan manusia yang sangat luas. Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari sudut manusianya, bukan hanya dari pertumbuhan ekonominya.

Keberhasilan pembangunan manusia yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia, Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat merupakan wujud nyata bahwa telah melaksanakan tugasnya dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dalam membangun kualitas hidup manusia untuk mencapai hidup layak. Indeks Pembangunan menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

Kesadaran akan potensi teknologi internet untuk meningkatkan IPM harus ditingkatkan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Lebih jauh, pendekatan ini diharapkan dapat menggugah masyarakat itu sendiri agar sadar akan eksistensi dan dapat merasakan manfaat/keuntungan yang dapat diperoleh dari penggunaan teknologi internet terhadap kegiatan sehari-harinya. Karena itu, membangun kesadaran dan meningkatkan partisipasi masyarakat akan manfaat teknologi internet perlu dilakukan secara kolektif, simultan dan terus-menerus di setiap lapisan masyarakat. Peningkatan kesadaran ini dilakukan melalui penyelenggaraan aktivitas seperti pelatihan, *focus group discussion*, konsultasi partisipatif, dan lain-lain. Selain itu juga, penyelenggaraan aktivitas tersebut harus ditunjang pula oleh sarana dan prasarana yang memungkinkan, seperti ruangan, komputer, jaringan internet, dan lain-lain. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat dapat terangsang melalui melihat, mencoba, dan merasakan manfaat dari teknologi internet tersebut.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan pendidikan dilaksanakan untuk mencapai tujuan terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berakhlak mulia, dengan sasaran meningkatkan jenjang dan kualitas pendidikan dan ketrampilan penduduk. Strategi yang dilaksanakan melalui peningkatan kualitas jenjang dan kualitas pendidikan, serta peningkatan keterampilan penduduk dengan cara pengembangan sumber daya lokal. Arah kebijakan yang ditempuh dengan peningkatan mutu pendidikan. Capaian kinerja urusan pendidikan dapat terlihat pada capaian indikator Angka Partisipasi Sekolah, Angka Melek Huruf melalui pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, serta Rata-Rata Lama Sekolah.

Adapun beberapa kebijakan, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Pemerintah dalam meningkatkan pengembangan dan pembangunan pendidikan Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, antara lain:

1) Peningkatan Akses dan pemerataan pendidikan

Pemerataan dan akses pendidikan diarahkan pada upaya memperluas daya tampung satuan pendidikan serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda baik secara social, ekonomi, gender dan tingkat kemampuan intelektual serta kondisi fisik. Prinsip dasar pemerataan ini sangat penting guna memberikan kesempatan bagi semua golongan masyarakat, untuk memperoleh pelayanan pendidikan yang baik. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas penduduk untuk dapat belajar sepanjang hayat dalam rangka peningkatan daya saing bangsa di era global, serta meningkatkan peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Beberapa kegiatan yang dilakukan Pemerintah dalam meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan, yakni:

- a. Memberikan Pendidikan Gratis
- b. Membangun Sarana dan Prasarana Sekolah

2) Peningkatan Mutu Pendidikan

Pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan kompetensi, baik

kompetensi akademik maupun kompetensi kejuruan, yang dilandasi oleh kompetensi personal dan sosial, serta nilai-nilai akhlak mulia yang keseluruhannya merupakan kecakapan hidup (*life skill*). Kebijakan peningkatan mutu pendidikan di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat diarahkan pada pencapaian mutu pendidikan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP). Peningkatan mutu pendidikan diarahkan pada perluasan akses inovasi pembelajaran pada pendidikan formal maupun nonformal dalam rangka mewujudkan proses pembelajaran yang efektif, efisien, menyenangkan dan menerdaskan sesuai tingkatan perkembangan peserta didik.

Pemerintah Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pendidikan telah melakukan berbagai kegiatan dalam meningkatkan mutu pendidikan, yakni:

- a. Melaksanakan Workshop Penguatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- b. Memberikan Bantuan Hibah Dana Operasional Rombongan Belajar
- c. Memberikan Beasiswa kepada Siswa dan Mahasiswa Berprestasi
- d. Memajukan Jenjang Pendidikan Perguruan Tinggi
- e. Melakukan Kerjasama dengan Universitas Ternama di Indonesia

Pemerintah Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat melalui Organisasi Perangkat Daerah terkait yaitu Dinas Pendidikan mengadakan program pengentasan buta aksara berupa kejar Paket A, Paket B dan Paket C yang ditujukan untuk masyarakat Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Program ini diadakan dalam rangka mengentaskan angka putus sekolah masyarakat Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat yang berusia 25 tahun keatas. Harapannya akan ada banyak masyarakat yang berminat untuk mengikuti kejar paket namun rencana tersebut belum bisa berjalan dengan mulus.

Untuk menarik minat masyarakat Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat agar mau mengikuti program pemerintah dibidang pendidikan yaitu kejar paket dibutuhkan suatu perangsang. Perangsang tersebut berupa pemberian alat masak bagi ibu-ibu dan pemberian bonus.

Dalam melaksanakan program ini Dinas Pendidikan bekerjasama dengan BKBN selaku lembaga pelaksana teknis program kejar paket. Strategi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengurasi kesenjangan pendidikan antara masyarakat usia 25 tahun ke bawah dengan masyarakat yang usia 25 tahun keatas yang mana rata-rata belum tamat Sekolah Dasar.

Sementara untuk menunjang partisipasi masyarakat usia 25 tahun ke bawah dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat yaitu berupa pemberian beasiswa.

Ukuran pembangunan manusia menurut Badan Pusat Statistik yang terakhir adalah terkait dengan kemampuan daya beli. Kemampuan daya beli masyarakat Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat masih tergolong rendah, dikarenakan kurangnya inovasi dalam diri masyarakat sehingga berdampak pada produk yang dihasilkan yang masih dalam kondisi mentah atau belum diolah. Hal tersebut yang kemudian berdampak pada nilai jual dari produk yang dihasilkan oleh masyarakat Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Nilai jual produk yang sudah diolah dengan produk yang masih mentah sudah pasti berbeda, sehingga ketika masyarakat tidak memiliki kreativitas dalam mengolah produk tersebut menjadi sesuatu yang baru maka nilai jualnya akan berbanding lurus dengan kualitas produknya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, menurut Mahbub Ul Haq (1995:16) dibutuhkan "*empowerment*" yang dijabarkan oleh Alhumami (2009:2) sebagai berikut: "pemberdayaan yang merujuk pada setiap upaya membangun kapasitas masyarakat dengan cara melakukan transformasi potensi dan kemampuan, sehingga mereka memiliki kemandirian, otonomi dan otoritas dalam melaksanakan pekerjaan dan mengatasi permasalahan sosial)". Adanya pemberdayaan terhadap masyarakat tersebut diharapkan mampu membuat masyarakat setempat menjadi lebih mandiri dalam mengatasi permasalahan sosial yang ada.

Efek domino lainnya yaitu rendahnya harga jual produk-produk yang ada di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat telah mengakibatkan kontribusi PDRB dari sektor-sektor pertanian maupun perdagangan di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat ikut

rendah. Sebesar 58,2% masyarakat Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat bekerja disektor pertanian (meliputi perkebunan, perikanan, dan peternakan) sementara kontribusi terhadap PDRB yang dihasilkan dari penduduk yang bekerja disektor pertanian tersebut hanyalah sebesar 3,4%. Sementara masyarakat Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat yang bekerja disektor perdagangan adalah sebesar 14,5% dan sisanya adalah yang bekerja di non pertanian dan non perdagangan (PNS, ibu rumah tangga, dan lain-lain).

Faktor lain yang mempengaruhi perekonomian masyarakat Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat adalah terkait dengan ketersediaan bahan baku usaha. Bahan baku yang ada di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat cukup banyak namun kualitasnya tidak cukup baik sehingga hasil produksi yang diperoleh tidak maksimal. Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, pemerintah daerah Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat melakukan kerjasama dengan mendatangkan beberapa bahan baku dari luar wilayahnya. Adanya kerjasama dalam hal mendatangkan bahan baku dari luar ini sudah sejalan dengan satu dari 4 komponen penting dalam paradigma pembangunan manusia menurut Mahbub Ul Haq (1995:16) yaitu "*productivity* (produktifvitas yang merujuk pada usaha-usaha sistematis yang bertujuan meningkatkan kegiatan ekonomi)". Maksudnya adalah, pemerintah daerah Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat telah menunjukkan usaha-usahanya dalam meningkatkan kegiatan ekonomi diwilayahnya melalui kerjasama pengadaan bahan baku usaha.

IPM mendorong pertumbuhan ekonomi melalui bisnis, dikarenakan bisnis merupakan salah satu penentu pertumbuhan ekonomi melalui bisnis akan terjadi perputaran uang dengan demikian juga dalam berbisnis akan ada aturan yang merujuk pada pembangunan manusia yang berkelanjutan serta pembangunan kualitas sumberdaya manusia dengan berbagai strategi yaitu sebagai berikut:

1. Penguatan neraca perdagangan seperti ekspor impor
2. Penguatan permintaan domestik seperti pemberian kebijakan KUR (Kredit Usaha Rakyat) kepada masyarakat yang memiliki UMKM

3. Transformasi struktural seperti dalam bidang pertanian, sektor jasa, dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan

Standar hidup layak masyarakat dapat menggambarkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang dapat diukur dengan paritas daya beli (*purchasing power parity*). Peningkatan daya beli bisa dilakukan dengan peningkatan pengeluaran perkapita melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat yakni Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dengan dibentuknya UMKM diharapkan bisa meningkatkan pendapatan masyarakat, karena dengan meningkatnya pendapatan masyarakat maka kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok juga ikut meningkat.

Pemerintah Kecamatan Padalarang melaksanakan beberapa program dan kegiatan dalam meningkatkan standar hidup layak melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, diantaranya:

1. Meningkatkan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan salah satu pembangunan yang dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan inovasi dalam masyarakat itu sendiri. Meningkatkan ekonomi masyarakat merupakan salah satu upaya dalam menanggulangi kemiskinan yang dilakukan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat telah melakukan berbagai kegiatan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, diantaranya:

- 1) Meningkatkan Kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang merupakan bagian dari ekonomi kerakyatan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menyatakan bahwa UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Beberapa upaya

meningkatkan Kualitas produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, diantaranya:

- a) Memberikan Izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)
  - b) Memberikan Sertifikasi Halal
  - c) Memberikan Merk
  - d) Memfasilitasi Kemasan dan Desain Produk
- 2) Meningkatkan Permodalan UMKM
- a. Memfasilitasi Pinjaman Bunga Murah dengan Pola Kemitraan dan Kredit Usaha Rakyat (KUR), yakni Pemerintah Kabupaten Bandung Barat bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan PT Bank terkait penyaluran dana pinjaman modal dalam membantu permodalan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). dengan kemitraan yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat dapat mempermudah pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya dengan pinjaman yang diberikan oleh BUMN dan Perbankan melalui KUR dengan bunga yang lebih rendah. Sedangkan untuk masyarakat kurang mampu atau masyarakat miskin yang ingin membuka usaha dan membutuhkan modal akan dimasukkan ke PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) atau lebih dikenal dengan Bank Syariah BAS.
  - b. Memberikan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK), yakni Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Bandung Barat menargetkan untuk menerbitkan sebanyak 250 Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dalam upaya menumbuhkan wirausahawan baru sebagai penopang kekuatan ekonomi. Pelaku usaha UMK wajib memiliki IUMK agar memiliki legalitas hukum yang jelas, sehingga memudahkan dalam mengakses bantuan dan pinjaman dari perbankan.

Faktor penghambat yang mungkin dihadapi oleh Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat yang berhubungan langsung secara teknis dengan komponen-komponen pembentuk IPM sangatlah kompleks. Faktor penghambat yang pertama berasal dari bidang pendidikan, seperti dikutip dari hasil wawancara dengan

Bapak MJ selaku Kabag Program Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat berikut:

bahwa yang menjadi kendala utama bagi Dinas Pendidikan dalam menjalankan strateginya adalah Sumber Daya Manusia di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Adanya animo yang berkembang di masyarakat utamanya yang berusia 25 tahun keatas yang beranggapan bahwa pendidikan tidak seberapa penting karena tidak mampu merubah kondisi perekonomian masyarakat. Apalagi dengan kondisi usianya sudah tua dan tidak memungkinkan untuk mengenyam pendidikan karena sudah tidak mampu.

Adapun Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintahan Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat dalam mengatasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam menjalankan strategi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai beriku;

1. Pengentasan Buta Aksara

Pengentasan Buta Aksara yang diperuntukan berupa kejar Paket A, Paket B, dan Paket C yang ditujukan untuk masyarakat putus sekolah dengan usia 25 tahun keatas. Luaran yang diharapkan dari rencana program tersebut adalah seluruh masyarakat putus sekolah yang berusia 25 tahun keatas dapat berpartisipasi namun ketika dimplementasikan cukup banyak masyarakat yang tidak mengikuti program tersebut. Evaluasi yang didapatkan dari kondisi tersebut adalah diperlukan sebuah rangsangan untuk menarik minat masyarakat setempat agar mau mengikuti program pengentasan buta aksara tersebut. Rangsangan tersebut adalah berupa pemberian alat masak bagi ibu-ibu dan pemberian bonus berupa uang saku bagi masyarakat yang mau berpartisipasi dalam program pemerintah.

2. Pemberian Beasiswa

Sementara untuk masyarakat usia sekolah, pemerintaan Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat memilih strategi pemberian beasiswa, menggratiskan biaya sekolah negeri, dan pemberian bantuan bagi siswa miskin diwilayah bersangkutan. Luaran yang diharapkan dari rencana tersebut adalah masyarakat usia sekolah mau melanjutkan pendidikan ke

jenjang yang lebih tinggi, upaya tersebut kemudian berhasil. Evaluasi yang didapatkan dari kondisi tersebut adalah program pemberian beasiswa, sekolah gratis, dan pemberian bantuan bagi siswa miskin yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat perlu dipertahankan. Hal ini dilakukan agar pembangunan manusia khususnya dibidang pendidikan di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat benar-benar meningkat.

### 3. Penetapan Angka Harap Hidup (AHH)

Di bidang kesehatan, pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat melalui Dinas Kesehatan khususnya di Kecamatan Padalarang merumuskan beberapa program sebagai strategi untuk menekan jumlah kematian di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Sejalan dengan cita-cita pemerintah daerah setempat tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat telah menetapkan Angka Harapan Hidup (AHH) yang bekerja sama dengan puskesmas sebagai salah satu indikator kinerjanya. Sehingga layanan kesehatan bagi masyarakat Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat sudah tersedia sejak dari ibu hamil, melahirkan, sampai lansia. Dalam menjalankan program kerjanya, Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat selalu disertai dengan rencana aksi. Rencana aksi ini dilakukan setiap triwulan dengan disertai evaluasi untuk mengukur ketercapaian program yang telah dilaksanakan. Untuk program yang memiliki capaian yang rendah, maka akan disertai rencana aksi agar capaian program tersebut dapat meningkat. Rencana aksi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan tersebut berpatokan pada pedoman kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat.

Selama menjalankan tugasnya sebagai pelaksana teknis bidang kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat telah mendapatkan penghargaan sebagai peringkat 6 dalam kategori pelayanan terbaik untuk program nasional bebas pasung. Hal tersebut menunjukkan bahwa dari sisi internal kelembagaan Dinas Kesehatan sudah cukup baik dalam melaksanakan strategi peningkatan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Bandung Barat. Hanya saja masih diperlukan beberapa upaya untuk

mengentaskan belenggu masyarakat utamanya masyarakat yang berpendidikan rendah dari ketidaktahuan akan adanya program kesehatan.

#### 4. Pemberian Kemudahan Pengurusan Perizinan Usaha dan Fasilitas Kebutuhan Usaha Rumah Tangga

Kemampuan daya beli suatu masyarakat menjadi salah satu tolak ukur bagi pemerintah dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat disuatu daerah. Sebagai salah satu daerah tertinggal di Indonesia, Kabupaten Bandung Barat memiliki suatu permasalahan yang cukup kompleks yang bermuara pada rendahnya pendidikan masyarakat disana yang akhirnya menimbulkan efek domino bagi sektor yang lain. Dalam upayanya untuk mengentaskan keterbelengguan akan kondisi yang terbelakang tersebut, pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah melakukan beberapa strategi guna meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Bandung Barat. Beberapa strategi tersebut diantaranya adalah pemberian kemudahan dalam pengurusan perizinan usaha dan pemberian fasilitasi kebutuhan usaha rumah tangga. Dengan adanya kemudahan perizinan pendirian usaha dan fasilitasi kebutuhan usaha rumah tangga diharapkan minat masyarakat untuk berwirausaha semakin besar. Hal ini yang juga akan berpengaruh pada berkurangnya angka pengangguran dan peningkatan pendapatan masyarakat Kabupaten Bandung Barat.

#### 5. Membangun Kerjasama Antar Daerah

Strategi lainnya yaitu upaya membangun jejaring atau kerjasama antar daerah. Kerjasama antar daerah ini dimaksudkan untuk memudahkan pemenuhan kebutuhan masyarakat Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat akan bahan baku usaha maupun akses pengiriman produk-produk usahanya. Kebutuhan akan pentingnya pengenalan brand produk usaha milik masyarakat akan lebih mudah apabila dilakukan melalui kerjasama dengan daerah sekitar melalui promosi dagang. Sehingga kerjasama antar daerah ini menjadi suatu yang penting dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat untuk memasarkan produk-produk dari UKM binaan Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja selaku pelaksana teknis.

## 6. Pembuatan Grand Design

Selain melalui kerjasama, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Bandung Barat telah membuat grand design yang mana grand design ini bertujuan untuk meningkatkan standarisasi Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam meningkatkan standarisasi Sumber Daya Manusia tersebut Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan selaku pelaksana teknis memberikan beberapa materi tentang HRP, motivation training, dan lain sebagainya. Materi-materi tersebut tidak hanya diberikan secara searah melainkan juga dua arah, artinya setelah menerima materi masyarakat yang menjadi peserta diminta untuk membuat perencanaan berupa market inteligen. Melalui cara tersebut kemudian masyarakat mampu menciptakan produk yang berkualitas.

## 7. Membangun Sarana dan Prasarana

Berdasarkan upaya langsung yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat saat ini telah berjalan dengan baik dan telah berjalan sesuai aturan yang berlaku dengan menyediakan sarana dan prasarana yang telah memadai.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada bab sebelumnya mengenai peningkatan pembangunan manusia di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kecamatan Padalarang berada pada posisi menengah bawah. Berkaitan dengan strategi peningkatan pembangunan manusia, pemerintah Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat pada dasarnya telah mengimplementasikan beberapa strategi terkait peningkatan komponen-komponen pembangunan manusia di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Dalam penelitian ini, strategi yang digunakan oleh pemerintah Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat ditinjau berdasarkan *master strategy*. Faktor-faktor penghambat didapatkan dari 3 komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia yaitu di bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi.

### 1. Bidang Pendidikan

Permasalahan yang terjadi di bidang pendidikan yang mempengaruhi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia diantaranya lemahnya pengetahuan masyarakat, tingginya angka buta aksara dan banyaknya masyarakat yang mengalami putus sekolah. Adapun upaya yang dilakukan pemerintahan Kecamatan Padalarang dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan melakukan Penetasan Buta Aksara, Pemberian Beasiswa dan peningkatan Sarana Prasarana di Bidang Pendidikan.

## 2. Bidang Kesehatan

Masih banyaknya masyarakat yang mengonsumsi makanan kurang bergizi sehingga mengakitkan kesehatan masyarakat yang rendah contohnya dalam kesehatan Ibu dan Anak, banyaknya anak-anak yang mengalami stunting dan rendahnya angka harap hidup masyarakat. Sehingga pemerintahan Kecamatan Padalarang bekerjasama dengan Pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat melalui Dinas Kesehatan dan *Stake Holder* yang terkait dengan melakukan Penetapan Angka Harap Hidup (AHH) di Kecamatan Padalarang, meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan, dan meningkatkan sarana prasarana kesehatan di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat.

## 3. Bidang Ekonomi

Rendahnya Daya Beli masyarakat yang diakibatkan masyarakat yang cenderung beranggapan lebih baik menjadi seorang tenaga kerja daripada membangun sebuah usaha sendiri sehingga produktivitas masyarakat sangat rendah. Untuk mengatasi hal ini pemerintahan Kecamatan Padalarang melakukan upaya diantaranya memberikan kemudahan kepada masyarakat yang ingin membuat perizinan untuk usaha mereka lalu memberikan fasilitas kebutuhan usaha rumah tangga, meningkatkan sarana prasarana dan upaya lain untuk mendorong peningkatan perekonomian masyarakat.

Strategi yang diterapkan oleh pemerintah Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat dalam meningkatkan pembangunan manusia adalah melalui empat master strategy yaitu *enterprise strategy, corporate strategy, business strategy, functional strategy*. Strategi alternatif yang direkomendasikan untuk dapat digunakan oleh Pemerintah Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat dalam upayanya untuk meningkatkan pembangunan manusia di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Strategi tersebut dirumuskan dengan tujuan untuk memanfaatkan kekuatan dan memaksimalkan peluang yang dimiliki oleh pemerintah setempat guna mengatasi kelemahan dan meminimalisir ancaman yang ada strategi alternatif tersebut secara rinci

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- A. Chaedar Alwasilah 2002. *Dasar-Dasar Merancang Dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya.
- Alma, Buchari dan Ratih Hurriyati. 2008. *Manajemen Corporate dan Strategi Pemasaran Jasa Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- David. Fred R. 2011. *Strategic Management*. Buku 1 Edisi 12 Jakarta; Salemba Empat.

- Grant. Robert, M. 1999. *Analisa Strategi Kontemporer, Konsep, Teknik, Aplikasi*. Jakarta: Erlangga.
- Hamidi, Hanibal. 2015. *Indeks Desa Membangun*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Jakarta Selatan
- Hariadi, Hariadi, Bambang. 2005. *Strategi Manajemen*. Jakarta: Bayumedia Publishing.
- Human Development Report (1990). Published for the United Nations Development Program (UNDP). New York, Oxford: Oxford University Press
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar.2001. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Kansil. 1993. *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan Edisi Ketiga*. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Lexy J. Moleong.2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:Remaja Rosdakarya.
- Muljono. 2012. *Strategi Pembelajaran*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Musanef. 1985. *Sistem Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: Masagung.
- Nasution. 1996. *Metode Penelitian Naturlalistik-Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Nawawi, Hadari. 2012. *Manajemen Strategik Organisasi Non-Profit Bidang Pemerintahan dengan Ilustrasi di Bidang Pendidikan*. Jakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nilasari, Senja. 2014. *Manajemen Strategi*. Jakarta: Dunia Cerdas
- Nisjar, Kahri dan Winardi. 1997. *Manajemen Stratejik*. Jakarta: CV. Mandar Maju
- Pamudji. 1995. *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rangkuti, Freddy. 2013. *Riset Pemasaran*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sabli, Beng. 2000. *Gerakan Strategis Pemberdayaan Daerah: Penggesaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat di Daerah Kabupaten Kepulauan Riau*. Pekanbaru: UNRI Press

- Salusu, J. 1996. *Pengambilan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik dan Organisasi non-Profit*. Jakarta: PT Grasindo.
- Suradinata, Ermaya. 1998. *Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Bandung: Citra Grafika.
- Suryaningrat, Bayu. 1988. *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bina Aksara.
- Syafiie, Inu Kencana. 1992. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Eresco.
- Tjiptono, Fandy. 2006. *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Wahyudi 2017, *Manajemen Konflik dan Stres dalam Organisasi, Pedoman Praktis bagi Pemimpin Visioner*, Bandung: Alfabeta.
- Wheelen dan Hunger, David. 2004. *Manajemen Strategis*. Jakarta: Andi.

**Jurnal:**

- Almasdi Syahza dan Suarman. 2013. Strategi Pengembangan Daerah Tertinggal Dalam Upaya Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan. Volume 14 Nomor 1
- Bhakti, N.A., Istiqomah dan Suprpto. 2014. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia di indonesia periode 2008- 2012. Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan. 18 (4), 452-492
- Ginting, S.C.K., Lubis, I., danMahalli, K. 2008. Pembangunan Manusia di Indonesia dan factor-faktor yang mempengaruhinya. WahanaHijau: JurnalPerencanaan danPengembangan Wilayah. 4 (1), 17-24.
- Hendarmin. 2012. "Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah dan Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja, dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat." JEKSOS 8 (3) 144 - 155.
- Melliana, A dan Ismaini Zain. 2013. Analisis Statistika Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dengan Menggunakan Regresi Panel.Jurnal Sains dan Sni Pomits Vol. 2, No.2.